

Analisis Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Erma Suryani¹, Ana Merdekawaty²

1. Pendidikan Ekonomi, Universitas Samawa

2. Pendidikan Ekonomi, Universitas Samawa

Email : ermasuryani@universitassamawa.ac.id

anamerdekawati@universitassamawa.ac.id

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat varian belanja pemerintah kabupaten sumbawa pada tahun anggaran 2015 – 2017, (2) Tingkat pertumbuhan belanja pemerintah kabupaten sumbawa pada tahun anggaran 2015-2017,(3) Rasio keserasian belanja pemerintah kabupaten sumbawa tahun anggaran 2015-2017,(4) Efisiensi belanja pemerinta kabupaten sumbawa tahun anggaran 2015-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan proses pengalokasian belanja daerah meliputi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan APBD kabupaten sumbawa dan melalui wawancara secara tidak terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa rasio efesiensi belanja pemerintah kabupaten sumbawa pada tahun anggaran 2015 hingga 2017 telah menunjukkan adanya efesiensi anggaran. Peningkatan jumlah anggaran pada setiap tahun memberikan dampak pada tujuan penggunaan belanja yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan terlihat pada peningkatan IPM masyarakat. Data IPM masyarakat sumbawa terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 63,91% meningkat menjadi 64,89% tahun 2016 kemudian meningkat lagi menjadi 65,84% tahun 2017. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kinerja yang baik maka produktifitas dan efesiensi belanja juga akan semakin baik.

***katakunci** :Analisis, Struktur Belanja, Kabupaten Sumbawa*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau kebebasan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan desentralisasi. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menggali kemampuan daerahnya, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya

dalam melaksanakan pembangunan dengan cara menggali sumber-sumber potensial yang berada di daerah. Sumber-sumber potensial tersebut dikenal dengan nama Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Melalui PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menggunakan pendapat tersebut melalui penyusunan struktur belanja yang baik.

Kewenangan yang diamanatkan dalam UU dimaksud adalah keleluasaan dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pada era reformasi seperti sekarang ini pemerintah dituntut untuk transparansi laporan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi yang diterapkan oleh pemerintah tergambar pada laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan pelaporan realisasi adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang realisasi penggunaan anggaran yang didalam terdiri dari jабaran pendapat daerah, belanja daerah, transfer dan lain-lain.

Anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan. Anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Kabupaten di provinsi NTB memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Proporsi belanja sektor sanitasi dalam APBD kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 3 tahun terakhir ini terhadap total belanja langsung terlihat stagnan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 1%. Namun secara jumlah mengalami fluktuatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat varian belanja pemerintah kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2015 – 2017, (2) Tingkat

pertumbuhan belanja pemerintah kabupaten sumbawa pada tahun anggaran 2015-2017,(3) Rasio keserasian belanja pemerintah kabupaten sumbawa tahun anggaran 2015-2017,(4) Efisiensi belanja pemerintah kabupaten sumbawa tahun anggaran 2015-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk,2008) adalah “semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: Belanja pegawai, Belanja barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan sosial.
2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, serta Belanja aset lainnya (aset tak berwujud).
3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode peneliitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian adalah kantor pemerintah kabupaten Sumbawa, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan,Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Pemerintah (BAPPEDA) Kabupaten Sumbawa dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober tahun 2018.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka – angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- b. Data Kualitatif, data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian.

Teknik pengumpulan data yaitu data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen LRA kabupaten Sumbawa tahun 2015-2017.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk analisis data berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara: Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja (Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja) dan Analisis Efisiensi Belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Varian Belanja Pemerintah Daerah

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanjadengananggaran yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah termasuk Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran beljadengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Kinerja belanjapemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dinilai baik apabila realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yangdianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang baik.

Varian belanja dengan hasil yang signifikan menggambarkan dua kemungkinan pertama menunjukkan efesiensi penggunaan anggaran, kedua menunjukkan adanya kelemahan perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran. Data varians belanja kabupaten sumbawaselama 3 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Varian Belanja Kab. Sumbawa Tahun 2015-2017

KOMPONEN BELANJA	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A. BELANJA OPERASI						
1. Belanja Pegawai	66.007.723.254,28	9,07%	13.760.510.346,10	1,87%	30.025.276.894,91	4,39%
2. Belanja Barang	28.451.257.145,00	14,74%	35.210.099.199,21	13,68%	36.649.557.260,08	9,96%
3. Belanja Hibah	2.906.279.100,00	3,16%	1.308.390.013,00	4,85%	902.941.063,00	2,76%
4. Belanja Bantuan Sosial	3.182.893.514,00	21,17%	737.742.157,00	10,50%	1.107.148.650,32	5,45%
5. Belanja Bantuan Keuangan	130.051.378,40	12,15%	192.507.351,40	17,98%	4.114,40	0,00%
Jumlah Belanja Operasi	100.678.204.391,68	9,78%	51.209.249.066,71	4,97%	68.684.927.982,71	6,21%
B. BELANJA MODAL						
1. Belanja Tanah	5.329.142.336,00	13,90%	3.367.223.716,00	29,09%	4.465.995.980,00	4,83%
2. Belanja Peralatan dan Mesin	7.272.970.925,00	16,29%	2.527.542.978,42	5,22%	3.441.937.018,00	7,48%
3. Belanja Bangunan dan Gedung	2.439.012.002,00	3,84%	4.127.443.166,57	7,18%	2.403.114.693,00	3,63%
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.874.984.747,78	2,20%	25.391.570.278,28	12,52%	16.186.974.028,14	7,59%
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	2.951.890.363,00	65,41%	167.328.340,00	9,32%	2.474.448.746,00	15,11%
Jumlah Belanja Modal	20.868.000.373,78	7,41%	35.581.108.479,27	11,05%	28.972.470.465,14	6,67%
C. BELANJA TAK TERDUGA						
1. Belanja Tak Terduga	923.511.500,03	81,37%	350.000.000,00	100,00%	1.892.128.350,00	63,07%
Jumlah Belanja Tak Terduga	923.511.500,03	81,37%	350.000.000,00	100,00%	1.892.128.350,00	63,07%
D. TRANSFER						
1. Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	656.542.000,00	0,46%	1.149.064.101,00	0,52%	545.466.419,99	0,19%
Jumlah Transfer	656.542.000,00	0,46%	1.149.064.101,00	0,52%	545.466.419,99	0,19%
TOTAL BELANJA	123.126.258.265,49	8,47%	88.289.421.646,98	5,61%	100.094.993.217,84	5,47%

Sumber: LRA Kab. Sumbawa 2015-2017

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada Tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2015 persentase varian belanja sebesar 8,47%. Persentase tersebut terjabarkan dalam empat komponen belanja yakni belanja operasi sebesar 9,78 %, belanja modal sebesar 7,41%,belanja tak terduga 81,37 % dan belanja transfer 0,46. Varian belanja operasi didapatkan dari penyebaran anggaran pada belanja pegawai sebesar 9,07 %, belanja barang 14,74%,belanja hibah3,61%,belanja bantuan social 21,17% dan belanja bantuan keuangan sebesar 12,15 %. Angka yang ditunjukkan pada varian belanja modal di tahun 2015 didapatkan dari angga pada setiap komponen di belanja modal yang terdiri dari belanja tanah sebesar 13,90%, Belanja Peralatan dan mesin sebesar 16,29%, belanja bangunan dan Gedung sebesar 3,84%, belanja jalan,irigasi dan jaringan sebesar 2,20% dan belanja asset tetap lainnya sebesar 65,41 %.

Pada komponen belanja tak terduga sebesar 81,37 % besarnya persentase angka yang ditunjukkan pada komponen ini dikarenakan sedikitnya penggunaan dana tak terduga oleh pemerintah yang seharusnya memang di peruntukkan pada kejadian bencana alam atau serupa. sedangkan pada komponen belanja transfer di tahun 2015 0,46%. Jika melihat secara keseluruhan hasil analisis yang ditunjukkan melalui angka pada varian belanja pemerintah kabupaten sumbawa tahun 2015 dapat disimpulkan telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan.

Pada tahun 2016 persentase varian belanja mengalami penurunan dari tahun 2015 di angka 8,47% menjadi 5,61%. Tren penurunan angka persentase pada varian belanja tahun 2016 diikuti juga dengan adanya fluktuasi penambahan dan pengurangan angka pada komponen belanja operasi Persentase tersebut terjabarkan dalam empat komponen belanja yakni belanja operasi sebesar belanja modal sebesar 11,05%,belanja tak terduga 100 % dan belanja transfer 0,52%. Varian belanja operasi diangka 4,97 % yang diperoleh dari penyebaran anggaran pada belanja pegawai sebesar 1,87%, belanja barang 13,6%,belanja hibah 4,85%,belanja bantuan social 10,50% dan belanja bantuan keuangan sebesar 17,98 %. Pada belanja modal komponennya terdiri dari belanja tanah sebesar 29,09%, Belanja Peralatan dan mesin sebesar 5,22%, belanja bangunan dan Gedung sebesar 7,18%, belanja jalan,irigasi dan jaringan sebesar 12,52% dan belanja asset tetap lainnya sebesar 9,32 %.

Pada komponen belanja tak terduga sebesar 100% besarnya persentase angka yang ditunjukkan pada komponen ini dikarenakan jumlah anggaran yang dianggarkan tidak digunakan sehingga menjukan angka realisasi sebesar 0 %. Anggaran tak terduga setiap tahun akan dianggarkan oleh pemerintah minimal 5 % dari total belanja dengan tujuan penggunaannya jika adanya kejadian bencana alam atau serupa. Akan tetapi pada tahun 2017 kabupaten sumbawa tidak mengalami bencana alam yang menyebabkan terpakainya dana tak terduga. sedangkan pada komponen belanja transfer di tahun 2015 0,52%.pada tahun 2017 persentase varian belanja terealisasi sebesar 5,47%. Persentase tersebut terjabarkan dalam empat komponen belanja yakni belanja operasi sebesar 6,21 %, belanja modal sebesar 6,67%,belanja tak terduga 63,07% dan belanja transfer 0,19%.

Varian belanja operasi diangka 6,21 % yang diperoleh dari penyebaran anggaran pada belanja pegawai sebesar 4,39%, belanja barang 9,96%,belanja hibah 2,76%,belanja bantuan social 5,45% dan belanja bantuan keuangan sebesar 0,0001 %. Pada belanja modal komponennya terdiri dari belanja tanah sebesar 4,83%, Belanja Peralatan dan mesin sebesar 7,48%, belanja bangunan dan Gedung sebesar 3,63%, belanja jalan,irigasi dan jaringan sebesar 7,59% dan belanja asset tetap lainnya sebesar 15,11 %. Pada komponen belanja tak terduga sebesar 63,07% besarnya persentase perubahan angka yang ditunjukkan pada komponen ini dikarenakan jumlah anggaran yang dianggarkan direalisasikan penggunaannya karena adanya kejadian bencana alam yang dialami kabupaten sumbawa yakni banjir bandang. sedangkan pada komponen belanja transfer sebesar 0,19%.

Melihat hasil analisis yang ditunjukkan melalui angka pada varian belanja pemerintah kabupaten sumbawa tahun 2017 dapat disimpulkan telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan.

Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja yang dianggarkan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama Tahun 2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pertumbuhan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2016

KOMPONEN BELANJA	Tahun 2015	Tahun 2016	Pertumbuhan	
	Realisasi	Realisasi	Nominal	Persentase
A. BELANJA OPERASI				
1. Belanja Pegawai	661.974.437.867,00	724.031.637.254,00	62.057.199.387,00	9,37%
2. Belanja Barang	164.628.052.768,00	222.187.945.533,79	57.559.892.765,79	34,96%
3. Belanja Hibah	89.164.539.350,00	25.690.303.187,00	(63.474.236.163,00)	-71,19%
4. Belanja Bantuan Sosial	11.854.229.486,00	6.291.532.843,00	(5.562.696.643,00)	-46,93%
5. Belanja Bantuan Keuangan	940.560.378,00	878.104.405,00	(62.455.973,00)	-6,64%
Jumlah Belanja Operasi	928.561.819.849,00	979.079.523.222,79	50.517.703.373,79	5,44%
B. BELANJA MODAL				
1. Belanja Tanah	33.008.888.064,00	8.207.776.284,00	(24.801.111.780,00)	-75,13%
2. Belanja Peralatan dan Mesin	37.369.525.385,00	45.904.422.412,00	8.534.897.027,00	22,84%
3. Belanja Bangunan dan Gedung	61.017.524.365,00	53.394.819.330,00	(7.622.705.035,00)	-12,49%
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.643.371.880,00	177.388.954.410,00	49.745.582.530,00	38,97%
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.561.066.700,00	1.628.940.960,00	67.874.260,00	4,35%
Jumlah Belanja Modal	260.600.376.394,00	286.524.913.396,00	25.924.537.002,00	9,95%
C. BELANJA TAK TERDUGA				
1. Belanja Tak Terduga	211.488.500,00	0,00	(211.488.500,00)	-100,00%
Jumlah Belanja Tak Terduga	211.488.500,00	0,00	(211.488.500,00)	-100,00%
D. TRANSFER				
1. Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	140.594.620.360,51	220.160.105.919,00	79.565.485.558,49	56,59%
Jumlah Transfer	140.594.620.360,51	220.160.105.919,00	79.565.485.558,49	56,59%
TOTAL BELANJA	1.329.968.305.103,51	1.485.764.542.537,79	155.796.237.434,28	11,71%

Sumber: LRA Kab. Sumbawa 2015-2016

Dari hasil analisis pertumbuhan belanja pemerintah kabupaten sumbawa pada tahun 2015 ke tahun 2016 menggambarkan adanya pertumbuhan belanja pemerintah diangka 11,71%. Pertumbuhan belanja tergambar dalam jumlah pertumbuhan pada belanja operasi sebesar 5,44 %, belanja modal sebesar 9,95 % pertumbuhan,

belanja tak terduga mengalami nilai negatif hingga -100% dikarenakan pada tahun 2016 tidak adanya angka realisasi penggunaan anggaran pada komponen belanja tak terduga. Selanjutnya untuk komponen belanja transfer berada di kisaran angka 56,59 %. Pertumbuhan pada belanja operasi diperoleh dari jumlah pertumbuhan belanja pada komponen-komponen belanja operasi meliputi pertumbuhan belanja pegawai sebesar 9,37%, belanja barang 34,49%, belanja hibah -71,19%, belanja bantuan social -46,93% dan belanja bantuan keuangan sebesar -6,64 %. Pada belanja modal komponennya terdiri dari belanja tanah sebesar -75,13%, Belanja Peralatan dan mesin sebesar 22,84%, belanja bangunan dan Gedung sebesar -1249%, belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 38,97% dan belanja aset tetap lainnya sebesar 4,35 %. Pada komponen belanja tak terduga sebesar -100% besarnya persentase angka yang ditunjukkan pada komponen ini dikarenakan tidak adanya pertumbuhan jumlah anggaran yang dianggarkan tidak direalisasikan penggunaannya pada tahun 2016. sedangkan pada komponen belanja transfer sebesar 56,59% pertumbuhannya.

Tabel 3 Pertumbuhan Anggaran Belanja Pemerintah Kab. Sumbawa Tahun 2017

KOMPONEN BELANJA	Tahun 2016	Tahun 2017		
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase (%)
A. BELANJA OPERASI				
1. Belanja Pegawai	724.031.637.254,00	654.525.915.134,71	(69.505.722.119,29)	-9,60%
2. Belanja Barang	222.187.945.533,79	331.349.599.525,42	109.161.653.991,63	49,13%
3. Belanja Hibah	25.690.303.187,00	31.765.298.810,00	6.074.995.623,00	23,65%
4. Belanja Bantuan Sosial	6.291.532.843,00	19.190.387.031,00	12.898.854.188,00	25,02%
5. Belanja Bantuan Keuangan	878.104.405,00	1.070.607.642,00	192.503.237,00	21,92%
Jumlah Belanja Operasi	979.079.523.222,79	1.037.901.808.143,13	58.822.284.920,34	6,01%
B. BELANJA MODAL				
1. Belanja Tanah	8.207.776.284,00	88.011.546.960,00	79.803.770.676,00	972,29%
2. Belanja Peralatan dan Mesin	45.904.422.412,00	42.576.129.632,00	(3.328.292.780,00)	-7,25%
3. Belanja Bangunan dan Gedung	53.394.819.330,00	63.872.223.315,00	10.477.403.985,00	19,62%
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.388.954.410,00	197.170.606.210,00	19.781.651.800,00	11,15%
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.628.940.960,00	13.905.508.254,00	12.276.567.294,00	753,65%
Jumlah Belanja Modal	286.524.913.396,00	405.536.014.371,00	119.011.100.975,00	41,54%
C. BELANJA TAK TERDUGA				
1. Belanja Tak Terduga	0,00	1.107.871.650,00	1.107.871.650,00	- %
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	1.107.871.650,00	1.107.871.650,00	- %
D. TRANSFER				
1. Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	220.160.105.919,00	286.031.210.059,61	65.871.104.140,61	29,92%
Jumlah Transfer	220.160.105.919,00	286.031.210.059,61	65.871.104.140,61	29,92%
TOTAL BELANJA	1.485.764.542.537,79	1.730.576.904.223,74	244.812.361.685,95	16,48%

Sumber: LRA Kab. Sumbawa 2016-2017

Dari gambaran hasil analisis data LRA yang di paparkan pada tabel diatas menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten sumbawa secara keseluruhan sebesar 16,48 %. Pertumbuhan tergambar pada jumlah pertumbuhan di komponen belanja operasi sebesar 6,01 %, belanja modal sebesar 41,54%, belanja transfer sebesar 29,92 % sedangkan pada belanja tak terduga tidak mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan pada belanja operasi diperoleh dari jumlah pertumbuhan belanja pada komponen-komponen belanja operasi meliputi pertumbuhan belanja pegawai sebesar -9,60%, belanja barang 49,13%, belanja hibah 23,65%, belanja bantuan social 25,02% dan belanja bantuan keuangan sebesar 21,92%. Pada belanja modal komponennya terdiri dari belanja tanah sebesar 972,29%, Belanja Peralatan dan mesin sebesar -7,25%, belanja bangunan dan Gedung sebesar 19,62%, belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 11,15% dan belanja asset tetap lainnya sebesar 753,65%. Pada komponen belanja tak terduga sebesar -0% besarnya persentase angka yang ditunjukkan pada komponen ini dikarenakan tidak adanya realisasi jumlah anggaran pada tahun 2016. Sedangkan pada komponen belanja transfer sebesar 29,92% pertumbuhannya.

Jika dilihat secara keseluruhan hasil perhitungan pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015-2017. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa di tahun 2016, pertumbuhan belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak positif (naik) sebesar 11,71%. Pertumbuhan belanja yang bergerak positif ini disebabkan adanya penambahan jumlah anggaran yang dilaksanakan dalam tahun 2016. Begitu pula dengan pertumbuhan belanja tahun 2017 juga terjadi peningkatan sebesar 16,48%. Pertumbuhan belanja yang bergerak positif ini disebabkan adanya penambahan jumlah anggaran yang dilaksanakan dalam tahun 2017. Terjadinya peningkatan pertumbuhan belanja ke arah positif menunjukkan bahwa kinerja belanja pemerintah kabupaten Sumbawa dapat dikatakan baik karena anggaran untuk sektor publik mengalami peningkatan.

Adanya peningkatan pertumbuhan belanja pemerintah kabupaten sumbawa menunjukkan adanya arah positif pada peningkatan IPM masyarakat. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 IPM masyarakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM masyarakat berada pada angka 63,91 % dan mengalami peningkatan sebesar 0,98 % atau menjadi 64,89 % pada tahun 2016. Hal serupa terjadi pula pada tahun 2017 peningkatan berada pada angka 0,95 atau menjadi 65,84%.

Hasil Analisis Keresasian Belanja Pemerintah Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Keberpihakan pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain-lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukan ke arah itu.

Tabel 4 Rasio Tiap Komponen Belanja terhadap Total Belanja Pemerintah Kab. Sumbawa

Komponen Belanja	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
	Rp (%)	Rp (%)	Rp (%)
Total Realisasi Belanja	1.329.968.305.103,51 100,00%	1.485.764.542.537,79 100,00%	1.730.576.904.223,74 100,00%
Belanja Operasi	928.561.819.849,00 69,82%	979.079.523.222,79 65,90%	1.037.901.808.143,13 59,97%
Belanja Modal	260.600.376.394,00 19,59%	286.524.913.396,00 19,28%	405.536.014.371,00 23,43%
Belanja Tak Terduga	211.488.500,00 0,02%	0,00 0,00%	1.107.871.650,00 0,06%
Belanja Transfer	140.594.620.360,51 10,57%	220.160.105.919,00 14,82%	286.031.210.059,61 16,53%

Jika melihat setiap komponen dalam tabel diatas maka belanja operasi mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan ini seiring dengan adanya pengurangan belanja pegawai pada komponen belanja operasi. belanja modal terus mengalami peningkatan mulai dari 19,59% di tahun 2015 hingga mencapai angka 23,43% di tahun 2017. Sedangkan belanja tak terduga mengalami kondisi yang berubah di tahun 2015 sebesar 0,02%, tahun 2016 sebesar 0,00% dan di 2017 sebesar 0,06 %. Sedangkan untuk belanja transfer pemerintah kabupaten sumbawa di tahun 2015 berada pada kisaran angka 10,57% , pada tahun 2016 pada angka 14,82% dan di tahun 2017 berada di angka 16,53 %. Dari ke empat komponen belanja tersebut belanja modal mengarah kepada arah keserasian belanja yang sangat baik karena hamper mendekati jumlah pengalokasian anggaran yang diamanatkan dalam RPJMD sumbawa 2016-2021 yakni pengalokasian anggaran untuk belanja modal sebesar 25%.

Hasil Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Berikut ini kami sajikan data rasio efisiensi belanja Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5 berikut ini.

Tahun	Komponen Belanja	Jumlah (Rp)		Rasio Efisiensi Belanja
		Anggaran	Realisasi	
2015	Total Belanja	1.453.094.563.369,00	1.329.968.305.103,51	91,53%
	Belanja Operasi	1.029.240.024.240,68	928.561.819.849,00	90,22%
	Belanja Modal	281.468.376.767,78	260.600.376.394,00	92,59%
	Belanja Tak Terduga	1.135.000.000,03	211.488.500,00	18,63%
	Belanja Transfer	141.251.162.360,51	140.594.620.360,51	99,54%

2016	Total Belanja	1.574.053.964.184,77	1.485.764.542.537,79	94,39%
	Belanja Operasi	1.030.288.772.289,50	979.079.523.222,79	95,03%
	Belanja Modal	322.106.021.875,27	286.524.913.396,00	88,95%
	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Transfer	221.309.170.020,00	220.160.105.919,00	99,48%
2017	Total Belanja	1.830.671.897.441,58	1.730.576.904.223,74	94,53%
	Belanja Operasi	1.106.586.736.125,84	1.037.901.808.143,13	93,79%
	Belanja Modal	434.508.484.836,14	405.536.014.371,00	93,33%
	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.107.871.650,00	36,93%
	Belanja Transfer	286.576.676.479,60	286.031.210.059,61	99,81%

Sumber : Data LRA Kabupaten Sumbawa

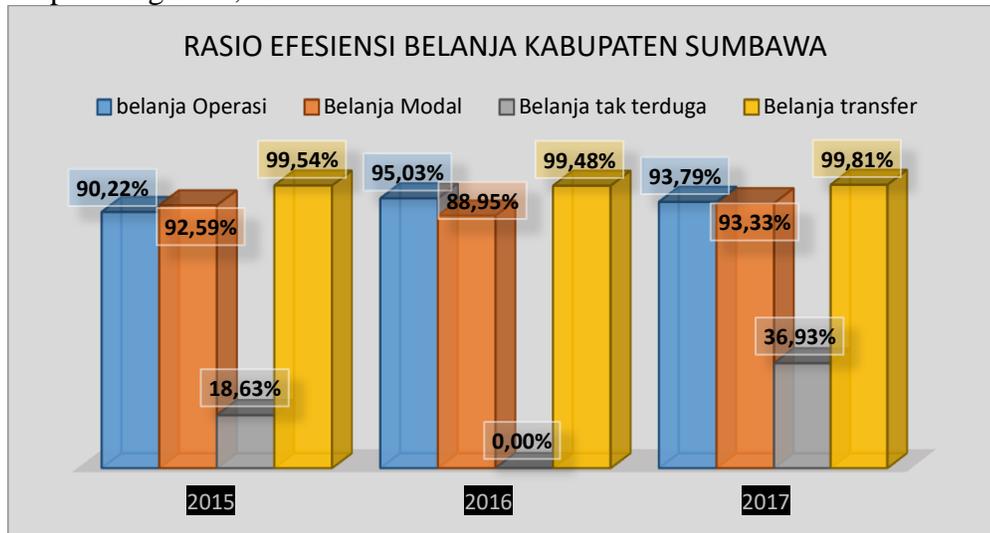
Jika melihat data yang tersajikan pada tabel di atas diketahui bahwa pengeluaran pemerintah selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 termasuk dalam kategori efisien karena rasionya berada di bawah 100%.

Pada tahun 2015 rasio efisiensi belanja pemerintah sebesar 91,53% yang terjabarkan pada empat komponen belanja meliputi belanja operasi sebesar 90,22%, belanja modal sebesar 92,59%, belanja tak terduga sebesar 18,63% dan belanja transfer sebesar 99,54%.

Pada Tahun 2016 rasio efisiensi meningkat secara angka menjadi 94,39% dari tahun 2015 yang disesuaikan dengan adanya peningkatan anggaran dari angka Rp.1.453.094.563.369,00 ditahun sebelumnya menjadi Rp.1.574.053.964.184,77 pada tahun 2016 dengan kisaran peningkatan sebesar Rp.120.959.400.816,00. Peningkatan tersebut diikuti pula oleh keempat komponen belanja ditahun 2016. Komponen belanja operasi meningkat 4,81% dari tahun sebelumnya menjadi 95,03%, komponen belanja modal jumlah anggaran ditahun 2016 meningkat sekitar Rp.40.637.645.107 yang diiringi dengan peningkatan efisiensi sebesar 3,64% merupakan selisih angka 92,59% menjadi 88,95%, belanja tak terduga ditahun 2016 berada pada angka 0,00% hal ini disebabkan tidak adanya penggunaan anggaran yang telah dianggarkan, sedangkan untuk belanja transfer mengalami peningkatan besar anggaran sebesar Rp.80.058.007.659,49 dan diikuti adanya peningkatan efisien dari tahun sebelumnya di angka 99,54% menjadi 99,48%.

Hal yang sama juga terjadi pada rasio efisiensi tahun 2017 dimana peningkatan jumlah anggaran juga terjadi dari total anggaran belanja sebesar Rp. 1.574.053.964.184,77 tahun sebelumnya menjadi Rp.1.830.671.897.441,58 dengan selisih peningkatan sebesar Rp. 256.617.933.257. peningkatan anggaran belanja tersebut diikuti pula adanya perubahan angka efisiensi sebelumnya diangka 94,39% menjadi 94,53% tahun 2017. Sedangkan untuk masing-masing komponen belanja terjabarkan pada komponen belanja operasi sebesar 93,79%, belanja modal sebesar 93,33%, belanja tak terduga sebesar 36,93% adanya perubahan angka efisiensi yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggaran di belanja tak terduga cukup besar dari tahun sebelumnya. Ditahun 2016 anggaran dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 meningkat sebesar

Rp.2.650.000.000,00 menjadi Rp.3.000.000.000,00, belanja transfer ditahun 2017 berada pada angka 99,81%.



Gambar 1: Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja kabupaten sumbawa tahun 2015-2017

Jika melihat secara menyeluruh rasio efisiensi belanja pemerintah pada tahun anggaran 2015 hingga 2017 telah menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penggunaannya. Peningkatan jumlah anggaran pada setiap tahun memberikan dampak pada tujuan penggunaan belanja yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini di tunjukan dengan adanya peningkatan IPM masyarakat selalu meningkat dan mengarah untuk mencapai angka target pemerintah.

Data IPM masyarakat sumbawa terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 63,91% meningkat menjadi 64,89% tahun 2016 kemudian meningkat lagi menjadi 65,84% tahun 2017. Perubahan angka yang tidak signifikan tersebut juga di sebabkan tidak adanya perubahan anggaran belanja secara signifikan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Varians belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja yang sudah bagus agar terus tingkatkan rasionya, dilain pihak pemerintah daerah Kabupaten Asmat juga harus meningkatkan PAD nya dengan mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak, retribusi dan lain-lain. Perlu diperhatikan juga dalam menggali PAD Perlu diperhatikan pula Asas adil dan manfaatnya bagi masyarakat.
- b. Agar asas adil dan manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa lebih memperhatikan Kecerahan belanja antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja yang lebihmenyentuh

kepada masyarakat dan infrastruktur yang menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan.

- c. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
- d. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum.
- e. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja belanja secara lebih rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha ilmu. Jakarta
- Faud, Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba 4. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. 2007. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Endriadi. 2007. *Anggaran di negara miskin. People's solidarity for transparency*. Mataram
- Katit, Fransiskus dan Pinatik, Sherly. 2016. *Analisis Kinerja Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua*. Jurnal EMBA. Vol.4 N0.3 September 2016, Hal. 572-582.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi. Yogyakarta
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Samawa Center
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah dalam negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah